

PANDUAN

PELAPORAN, PENANGANAN, & PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jalan Tuanku Tambusai Kumu, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu, Riau 28558

Tim Penyusun

Dr. Hardianto, MPD
Lufita Nur Alfiah, SP.,Msi
H. Hidayat SE, MM
Dr. Nofrizal, Lc, MH
Lusi Eka Afri, Msi
Rindi Ganesa Hatika, MSc
Dr. Nurrahmawati, MPd
Luth Fimawahib, M.Kom

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	1
Daftar Isi.....	2
Apa Isi Panduan Ini?.....	3
Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?.....	5
Mengapa Panduan Ini Penting?.....	8
Apa Itu Kekerasan Seksual?.....	17
Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU).....	24
Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.....	26
Dokumentasi & Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual.....	26
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual.....	28
Apa Saja Hak Penyintas, Saksi, dan/atau (Terduga) Pelaku?.....	32
Mekanisme Layanan Darurat dan Sistem Perujukan Kekerasan Seksual.....	36
Siapa yang Berhak Memberikan Layanan Darurat?.....	37
Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan.....	38
Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan?.....	38
Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis.....	39
Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis.....	39
Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Hukum.....	42
Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik.....	43
Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.....	44
Pendanaan dan Kerjasama.....	46
Referensi.....	47
Lampiran: Glosarium	48

Apa Isi Panduan Ini?

Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian (UPP) yang mencakup:

- a) Mekanisme-mekanisme penanggulangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan guna menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN. Mekanisme-mekanisme penanggulangan tersebut meliputi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan kasus kekerasan seksual; mekanisme tanggap darurat dan sistem perujukan; serta mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual (maupun pelaku dalam kondisi tertentu).
- b) Mekanisme-mekanisme pencegahan yang dilakukan guna memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi di lingkungan kampus UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

Panduan ini berlaku bagi seluruh warga UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN yang terdiri dari mahasiswa, dosen, asisten dosen, tutor, peneliti, asisten peneliti, tenaga kependidikan, stafnon- dosen/non-peneliti/non-tenaga kependidikan seperti satpam, tenaga kebersihan, pemagang, tukang, dan pekerja kontrak lainnya yang dipekerjakan berdasarkan SK Rektor, SK Dekan, maupun keputusan unit-unit di bawahnya, serta bagi pengunjung yang sedang berada di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

Karenanya, Panduan ini akan berlaku setidaknya dalam skenario berikut:

- Jika penyintas dan pelaku kekerasan seksual berasal dari UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, maka penanganan kasus akan dilakukan dengan berbasis pada Panduan ini.
- Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari unit lain di dalam YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan dengan berbasis Panduan ini, sementara UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke tingkat yayasan jalur hukum sesuai kehendak penyintas.

Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari luar YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan berbasis Panduan, sementara UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke lembaga eksternal yang terkait dan/atau jalur hukum sesuai kehendak penyintas.

Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari luar UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, maka penanganan pelaku akan dilakukan dengan berbasis pada Panduan ini, sementara penyintas akan didampingi oleh mitra rujukan yang relevan dengan pengawasan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?

Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian (UPP). Panduan ini hendaknya dijalankan berdasarkan sembilan prinsip [2] berikut:

1) Berperspektif dan berpusat pada penyintas (*survivor-centered*)

Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus selalu berperspektif penyintas. Proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan penyintas. Segala keputusan penting terkait pelaporan dan penanganan harus diambil dan dilakukan dengan sepengetahuan penyintas.

Penyintas kekerasan seksual merupakan individu yang sebenarnya memiliki kekuatan dan gagasan untuk menyelesaikan masalahnya. Karenanya, penyintas juga berhak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan yang konstruktif secara mandiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun (*self-determination*) setelah pendamping dan konselor sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pendamping dan konselor harus menghormati dan menghargai keputusan penyintas yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian masalahnya.

2) Adil Gender

Pelaksana Panduan harus berperspektif adil gender agar dapat memahami bagaimana kekerasan seksual dimungkinkan karena konstruksi gender yang membuat beberapa kelompok lebih rentan daripada yang lain. Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adil gender diperlukan agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarakan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

3) Tidak membeda-bedakan (*non-discrimination*)

Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang penyintas kekerasan seksual, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Pelaksana Panduan juga perlu memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang berada di masyarakat, karenanya pelaksana Panduan perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani penyintas dari kelompok yang beragam - misalnya, kemampuan berbahasa isyarat, dsb.

[2] Dikutip dan disarikan dari Panduan Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan D.I.Y, hal.15-21

4) Tidak menghakimi (*non-discrimination*)

Upaya-upaya penhapusan kekerasan seksual harus terbuka dan menghargai pengalaman penyintas kekerasan seksual sehingga pelaksana Panduan seharusnya tidak mudah menyimpulkan, menghakimi, apalagi menyalahkan penyintas kekerasan seksual tanpa proses investigasi yang mendalam.

5) Kenyamanan dan Tanpa Paksaan

Proses penanganan kekerasan seksual harus memperhatikan kenyamanan penyintas dan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Dalam menentukan pendamping atau konselor yang akan berhadapan dengan penyintas, pertimbangan harus dibuat dengan melihat berbagai aspek, termasuk jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agaman, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Contoh, penyintas berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor berjenis kelamin perempuan, penyintas difabel mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor yang menguasai bahasa isyarat, dsb.

6) Kesetaraan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus diawali dengan kesadaran bahwa penyintas dan pelaksana Panduan memiliki kuasa yang setara - tidak ada yang semestinya merasa lebih tahu atau memiliki kewenangan untuk mendominasi.

7) Kerahasiaan dan Keamanan

Seluruh proses pendokumentasian, baik secara audio, tertulis, maupun visual, perlu dilakukan atas sejuta penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan dari proses pendokumentasian tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas kekerasan seksual juga harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak berarti informasi terkait penyintas dan kasusnya tidak boleh disebarluaskan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi tersebut dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum, pada polisi saat proses penyelidikan/penyidikan, dsb.

8) Kepekaan terhadap Situasi Krisis

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual seharusnya dilaksanakan secara serius dan bersifat segera. Pelaksana Panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

9) Pemberdayaan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas, bukan kebutuhan dan kepentingan pendamping atau konselor. Karenanya, proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini perlu diingat karena adanya resiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam kondisi demikian, pendamping atau konselor secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan suara penyintas dalam menyelesaikan masalahnya.

Mengapa Panduan Ini Penting?

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya.^[3] UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang - baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan - dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Namun, perlu diingat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Di balik setiap kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. Kekerasan struktural bekerja di level sistemik, berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan.^[4] Distribusi akses dan privilese yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang lebih lemah rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural bekerja di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural.^[5] Kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal, bahkan benar.



Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan kita untuk peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

[3] Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* Vol. 6, No. 3 (1969): 168.

[4] Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," 171.

[5] Johan Galtung, "Cultural Violence, *Journal of Peace Research* Vol. 27, No. 3 (1990): 291-292.

Sementara di level kultur, kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur *victim-blaming* dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamaik beredar di masyarakat. Mitos maupun prasangka-prasangka ini^[6] bahkan seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari, bahkan dikoreksi:

MITOS / PRASANGKA	REALITAS
Perilaku penyintaslah yang menyebabkan kekerasan seksual	Perilaku apapun dari penyintas - termasuk, misalnya, berjalan di malam hari, menumpang bermalam, dsb. - bukanlah "undangan" untuk melakukan atau dikenai tindak seksual. Tidak ada penyintas yang dengan sengaja menyebabkan dirinya mendapatkan kekerasan seksual
Kekerasan seksual terjadi karena cara seseorang berpakaian	Pemahaman bahwa kekerasan seksual terjadi karena cara berpakaian penyintas menyebabkan pelaku tidak dapat menahan birahinya merupakan sebuah kesalahan. Survei Koalisi Ruang Publik Aman tentang "Pelecehan Seksual di Ruang Publik" yang dilakukan pada akhir tahun 2018 menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada mereka yang memakai rok dan celana panjang, hijab, baju lengan panjang, dan seragam sekolah. Artinya, cara berpakaian tidak boleh dipahami sebagai bentuk ajaran penyintas (<i>victim participation</i>). Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, terlepas dari pakaian apa yang sedang dikenakan.
Wajar jika tindak kekerasan seksual terjadi pada seseorang yang hilang kesadaran karena mabuk	Persetujuan (<i>consent</i>) yang bermakna hanya bisa diberikan oleh seseorang yang sadar dan berdaya. Seseorang tidak dapat dan tidak boleh dimintai persetujuannya jika dalam kondisi tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan, contohnya, sedang tidur, pingsan, mabuk karena pengaruh alkohol dan/atau obat-obatan.
Pemerkosaan adalah satu-satunya bentuk kekerasan seksual	Tindak perkosaan berbasis penetrasi vagina secara paksa seringkali dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam menentukan tingkat urgensi kasus kekerasan seksual. Cara pandang ini bermasalah karena abai terhadap para penyintas yang menderita secara fisik, seksual, dan/atau psikis karena mengalami pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tak kalah serius.

[6] Dikutip dan disesuaikan dari Bureau de Cooperation Interuniversitaire, *Sexual Harassment and Violence in the University Context: Report from the Task Force on Policies and Procedures Pertaining to Sexual Harassment and Violence* (Montreal: Bureau de Cooperation Interuniversitaire, 2017), hal. 17-18.

MITOS / PRASANGKA

REALITAS

Tindak kekerasan seksual pasti melibatkan kekerasan fisik yang dapat diidentifikasi dengan jelas

Sebagian besar tindak kekerasan seksual justru dilakukan secara licik dan perlahan melalui bujuk rayu, manipulasi, dan ancaman.

Pelaku kekerasan perlu dimaklumi karena perilakunya pasti disebabkan permasalahan psikologis

Sebagai sebuah ekspresi kuasa, tindak kekerasan seksual biasanya dilakukan secara sengaja sehingga sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Jika seseorang tidak melawan, maka yang terjadi bukanlah kekerasan seksual

Pada kasus kekerasan seksual, ketiadaan perlawanan terjadi karena banyak faktor. Misalnya, penyintas berada dalam kondisi tidak berdaya, penyintas mengalami freezing sebagai reaksi biologis-psikologis ketika merasa terancam, penyintas merasa takut akan kekerasan lanjutan, atau bahkan adanya budaya pasif yang sudah tertanam dalam diri penyintas sejak dulu. Ketiadaan perlawanan bukan berarti menerima atau menyetujui tindak kekerasan seksual.

Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ia terlambat atau memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya

Hanya sedikit penyintas kekerasan seksual yang berani melaporkan pengalamannya. Penyintas seringkali memiliki untuk menunda laporan atau bahkan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami kekerasan seksual yang dialami karena menghadapi beberapa resiko, antara lain: takut tidak dipercaya, disalahkan, dihakimi, atau mendapat stigma negatif, dan sanksi sosial; khawatir akan balas dendam oleh pelaku, proses penanganan yang tidak berpihak dan berlarut-larut, dsb.

Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ia tidak menunjukkan reaksi emosional tertentu

Reaksi penyintas kekerasan seksual berbeda-beda dan terkadang tak tampak jelas. Karenanya, reaksi tidak dapat dan tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur seberapa serius dampak kekerasan yang telah terjadi. Dampak kekerasan seksual juga harus diukur melalui mekanisme-mekanisme penanganan trauma, seperti pemeriksaan psikologis, visum et repertum, maupun visum et psikiatrikum.

MITOS / PRASANGKA

REALITAS

Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ceritanya tidak konsisten, atau bahkan kontradiktif

Cerita penyintas kekerasan seksual yang tidak konsisten atau kontradiktif tidak dapat dan tidak boleh dijadikan indikator untuk menentukan apakah tindak kekerasan benar-benar terjadi. Dalam banyak kasus, penyintas kesulitan menceritakan pengalamannya secara utuh dan konsisten karena banyak faktor, antara lain penyintas emosional dan traumatis, penyintas merasa perlu melindungi dan mempertahankan dirinya, penyintas dalam keadaan tidak sadar ketika kekerasan terjadi, jeda yang terlalu panjang antara waktu kekerasan terjadi dan pelaporan, dsb.

Banyak laporan kasus kekerasan seksual yang sebenarnya tidak terbukti

Ada banyak kasus tindak kriminal atau kekerasan yang lain yang juga tidak terbukti, tetapi bukan berarti laporan yang masuk tidak perlu diproses dan/atau tidak benar. Lagipula, pembuktian kasus kekerasan seksual memang sulit karena: jarang ada saksi yang mendengar dan melihat secara langsung, jarak yang panjang antara waktu kejadian dan pelaporan sehingga luka fisik yang mungkin dialami sudah sembuh, adanya rape culture melekatkan stigma pada penyintas kekerasan seksual, serta peraturan perundang-undangan yang memang belum mengakomodir jenis kekerasan seksual yang semakin berkembang.

Mengingat kompleksitas kekerasan sebagai fenomena sosial yang sudah dijabarkan di atas, Panduan ini penting sebagai pegangan dalam menciptakan keberadaan kampus yang damai di Universitas Pasir Pengaraian (UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN). Dalam konteks ini, kampus yang damai adalah kampus yang bebas dari kekerasan langsung dalam bentuk apapun, serta kekerasan struktural dan kultural yang memungkinkannya terjadi. Kampus yang damai secara proaktif berusaha mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta mengubah struktur dan kultur yang tadinya toleran terhadap kekerasan seksual menjadi struktur dan kultur yang menolak secara tegas kekerasan seksual dalam bentuk apapun.

Secara yuridis, Panduan ini juga dibutuhkan mengingat keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan berikut yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Dalam UUD 1945, disebutkan bahwa:

Pasal 27(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam huku dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B(2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28G(1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H(2). Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28J(1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J(2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Berbasis amanat konstitusional di atas, berikut beberapa peraturan perundungan yang dapat dirujuk sebagai basis hukum bagi upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan bagi penyintas:

**PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGA**

U No. 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan
Konvensi mengenai
Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita

**PENJABARAN PASAL SPESIF
IK(JIKA ADA)**

Relevan sebagai basis hukum di tingkat internasional
dan nasional

**PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGA**

UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan
Anak (serta perubahannya
dalam UU No. 35 Tahun
2014)

**PENJABARAN PASAL SPESIF
IK (JIKA ADA)**

Pasal 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9(1a). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

Pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa senjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.

Pasal 54(1). Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54(2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Pasal 4(1). Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 4(3). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 4(4). Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 12(2.a). Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Pasal 40(2). Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penhapusian
Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Pasal 45(1). Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga.

Pasal 8. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 15. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan dan perlindungan

UU No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen

Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 7(1.b.). Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Pasal 51(1.c.). Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sehalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memilihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 67(2). Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: (a) melanggar sumpah dan janji jabatan; (b) melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pasal 75 (1). Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 75 (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 75 (3). Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

Pasal 75 (5). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)

Pasal 5(1). Saksi dan korban berhak: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya;

(j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapatkan pendampingan.

Pasal 6(1). Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: (a) bantuan medis; dan (b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7A(1). Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas.

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Basis bagi Permendiknas No. 84 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan

Relevan sebagai basis hukum pengarustamaan gender di kampus.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan

Relevan sebagai basis hukum di tingkat daerah.

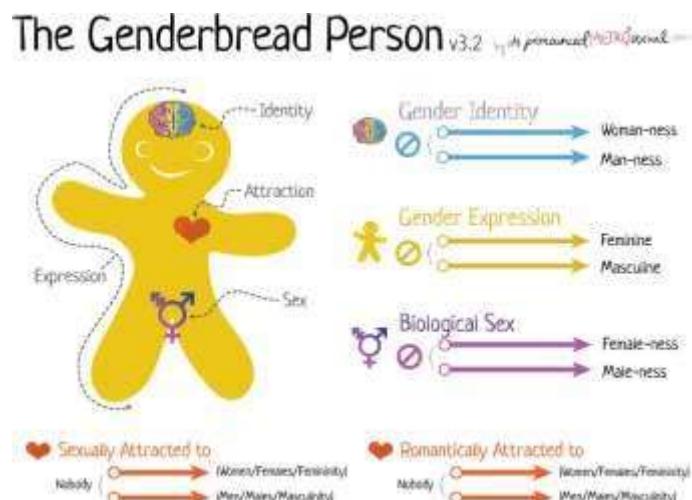
Apa Itu Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.[7]

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi di mana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas gender tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan ekspresi gender yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan bentuk ekspresi lainnya, maupun orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan romantis dan/atau seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual).



[7] Mengingat kelemahan definisi-definisi yang ditawarkan oleh perundang-undangan di Indonesia (lih. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 55-63), definisi ini disarikan dan disesuaikan dari definisi kekerasan seksual yang ditawarkan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), kajian yang dilakukan oleh Ettienne G. Krug, et.al. (2002) untuk World Health Organization (WHO).

Apa artinya? Kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada perempuan atau laki-laki saja. Kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang dengan jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual yang beragam. Ada tidaknya kekerasan seksual tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang disakiti - yaitu tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang.

Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, pemagang, pekerja non-tenaga kependidikan - seperti Satuan Keamanan Kampus (SKKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak - seperti penyedia jasa kantin atau katering, tata panggung, atau reparasi, maupun pengunjung - seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, dosen/peneliti dan mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus.^[8] Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran maupun di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan korban. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban.^[9] Rumah tangga yang dimaksud meliputi^[10]:

- a) suami atau istri, maupun mantan suami atau mantan istri;
- b) anak - baik kandung, tiri, maupun angkat;
- c) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap di dalam rumah tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; serta
- d) orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut, seperti asisten rumah tangga.

[8] "Sexual Violence and Sexual Harassment," University of California - Policy SVSH <https://policy.ucop.edu/doc/400385/SVSH>, diakses pada 26 Desember 2018.

[9] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1

[10] "UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," Mitra Wacana, diakses tanggal 25 Desember 2018, <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-no-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

Baik kekerasan dalam relasi pacaran atau rumah tangga biasanya terjadi karena "pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya." [11]

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*).

Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip [12] terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi:

- Diberikan oleh orang dewasa - jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi - persetujuan dan pertanyaan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non-verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- Diliberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar - persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen- mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi quid pro quo atau situasi di mana seseorang "terpaksa" menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, realsi pertemanannya, dsb.

[11] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari definisi "perbudakan seksual" yang terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 25.

[12] "What is Consent?," Sexual Assault Prevention and Awareness Center - University of Michigan, <https://sapac.umich.edu/article/49>, diakses pada 19 Desember 2018.

Spesifik - persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.

Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali - persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini.

Terlepas dari relasi antar-pelaku - tindak seksual dalam hubungan pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian No. 1 Tahun **2020** menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi beberapa kategori tindakan berikut:

Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Secara spesifik, menurut Komnas Perempuan, ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut:

1) Perkosaan

Perkosaan adalah "pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban." [13]

Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.[14]

2) Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, adalah "tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban." [15]

Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (*offline*) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (*online*) seperti email, status media sosial, konten internet, dsb.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.[16]

Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.[17]

[13] Rumusan dikutip dan disesuaikan dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 23 yang merujuk pada dokumen Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation," yang dapat diakses di http://www.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf.

[16] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 24 yang merujuk pada dokumen Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005", Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, "Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan," Komnas Perempuan, 2010, hal. 9.

[17] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual - Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasir Pengaraian, hal.3.

Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dan ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keseleman seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-bentuk seperti berikut[18]:

LISAN	NON-LISAN
Panggilan, siulan, dan desahan (catcalls)	Memperlihatkan gerak gerik seksual
Godaan dan candaan	Membuat ekspresi seksual
Cemoohan	Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual
Komentar bernada seksual - misal, tentang busana atau anatomi tubuh	Mempertontonkan organ seksual
Paksaan kencan	Menguntit
Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual	Mengirimkan konten internet bernada seksual
Menyebarluaskan informasi pribadi untuk kepentingan seksual	
Menyebarluaskan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual	

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.[19]

[18] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual - Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasir Pengaraian, hal.3.

[19] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13 dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 24 yang merujuk pada Buletin Sekretaris Jenderal PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksplorasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik di Poso 1998-2005." hal. 46.

5) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.[20]

6) Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk "mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya,"[21]

Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.[22]

Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.[23]

[20] Rumusan dikutip dan disarikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 20 dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 26 yang merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 5Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

[21] Rumusan dikutip dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 14.

[22] Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 25.

[23] Rumusan dikutip dan disarikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 15 yang merujuk pada Komnas Perempuan, "15 Jenis Kekerasan Seksual," yang dapat diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf.

Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU)

Penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Universitas Pasir Pengaraian (UPP) dilakukan dan dikoordinasikan oleh Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU). Sebagai sebuah unit yang bertanggung jawab pada Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, tugas TSU adalah:

1. Menyediakan ruang aman dan nyaman bagi penyintas maupun saksi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk *hotline*.
2. Melakukan dokumentasi dan verifikasi atas laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi.
3. Melakukan assessment terhadap kebutuhan penyintas dan membantu penyintas mengakses layanan darurat dalam kondisi-kondisi genting.
4. Menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual bersama dengan Rektorat, Komite Etik UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, dan tim investigasi ad hoc yang dibentuk oleh Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.
5. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas dan/atau saksi. Perlindungan adalah seluruh upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman kepada penyintas dan/atau saksi, sementara pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan guna mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, serta dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Pendampingan yang dimaksud mencakup layanan medis dan psikologis, pendampingan akademik, serta bantuan hukum.
6. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau proses implementasi sanksi dan/atau langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku kekerasan.
7. Melakukan, mengoordinasikan, dan/atau memantau upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN. Pencegahan adalah segala upaya nirkekerasan yang dilakukan untuk mencegah supaya kekerasan seksual tidak terjadi, tidak meningkat intensitasnya, dan/atau tidak terulang kembali.

8. Membangun jejaring dan kerjasama dengan unit-unit di dalam kampus maupun lembaga pengada layanan di luar UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN dalam mengupayakan penghapusan kekerasan seksual di kampus, baik di tahap perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban, maupun pencegahan.
9. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

TSU dibentuk berdasarkan SK Rektor dengan tim yang direkrut oleh komite yang dibentuk oleh Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN. Tim TSU terdiri dari dosen, mahasiswa, dan konselor yang memiliki keahlian untuk memberikan pendampingan yang diperlukan untuk penyintas selama proses penanganan kasusnya. Selain itu, tim ini juga harus berperspektif adil gender dan berkomitmen memenuhi prinsip-prinsip Panduan yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual oleh Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU) dilakukan berbasis laporan resmi dari penyintas. TSU memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual melalui tiga jalur, yakni:

1. Penyintas secara langsung melapor pada konselor TSU dengan berkunjung ke kantor TSU, mengisi formulir, atau menghubungi *hotline* pelaporan kekerasan seksual, baik melalui telepon maupun aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp atau Line, yang dikelola selama 24/7 secara bergantian oleh setidak-tidaknya 2 (dua) orang konselor TSU. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual, sementara konselor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
2. TSU mendapatkan rujukan secara formal dari Departemen-Departemen dan unit-unit di UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, unit-unit lain di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian, maupun organisasi dan lembaga lainnya yang merupakan bagian dari jejaring UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.
3. TSU melakukan penjangkauan (*outreach*) berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman (*peer*) penyintas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. Dalam banyak kasus, saksi biasanya adalah teman sebaya atau *peer* penyintas.

Dokumentasi & Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual

Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh TSU idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidak-tidaknya 3 x 24 jam oleh konselor TSU. Tahap awal yang akan dilakukan adalah dokumentasi dan verifikasi, di mana konselor TSU berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut:

- identitas pelapor;
- identitas (terduga) penyintas;
- identitas (terduga) pelaku;
- jenis kekerasan seksual yang terjadi;
- kronologi kejadian, yang setidak-tidaknya meliputi waktu dan tempat kejadian; dan
 - informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital.

Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh seorang konselor mengingat keterlibatan penyintas yang cukup intens selama proses ini berlangsung. Selain itu, pada tahap inilah, konselor TSU juga diharuskan untuk melakukan *assessment* awalnya terhadap kondisi penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan (lih. “Mekanisme Tanggap Darurat dan Sistem Perujukan” untuk pemberian layanan darurat dan “Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan” untuk pendampingan bagi penyintas).

Namun, jika kasus diperoleh dengan cara penjangkauan (outreach), maka perlu dipahami bahwa penyintas belum tentu siap menerima intervensi, apalagi kehadiran konselor. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap dokumentasi dan verifikasi, TSU perlu [24]:

- mempersiapkan pertemuan dengan cara yang seaman dan senyaman mungkin bagi penyintas. Misalnya, membentuk tim penjangkauan ad hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang agar kedatangan tim tidak mencolok, mempelajari kondisi penyintas melalui keterangan pihak ketiga, dsb.
- menemui penyintas guna menjalin hubungan positif dengan penyintas;
- memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan dengan jelas, termasuk bagaimana cara kerja TSU dalam menangani kasus kekerasan seksual;
- menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.

Proses dokumentasi dan verifikasi kasus, serta *assessment* awal terhadap kondisi penyintas harus dituangkan dalam laporan tertulis. TSU tidak boleh mengambil foto, merekam suara, maupun video tanpa seijin penyintas.

Selanjutnya, laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta hasil *assessment* awal terhadap kondisi penyintas akan didiskusikan dalam sebuah

[24] Dikutip dan disesuaikan dari buku *Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY* yang disusun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC.

rapat terbatas dengan pihak Rektorat yang turut melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang ingin diambil oleh penyintas, termasuk apa alternatif-alternatif penyelesaian kasusnya, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan, apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul bagi penyintas, serta apa pendampingan yang dibutuhkan.

Jika penyintas berhalangan hadir dalam pertemuan di atas, maka TSU berkewajiban mendiskusikan laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta langkah-langkah tindak lanjutnya bersama penyintas dan/atau pendampingnya dalam pertemuan terpisah. TSU wajib mengomunikasikan hasil pertemuan terpisah dengan penyintas kepada pihak Rektorat.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan sejauh penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti penyintas dan/atau pendampingnya, TSU, Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, Komite Etik UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, dsb.

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Dalam kasus-kasus di mana penyintas melapor guna menuntut penyelesaian kasus (bukan hanya mengakses layanan pendampingan), maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni penyelesaian etik dan penyelesaian hukum.

Penyelesaian etik merujuk pada penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Penerapan sanksi etik hanya berlaku pada kasus-kasus di mana (terduga) pelaku merupakan bagian dari sivitas akademika Universitas Pasir Pengaraian sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Pasir Pengaraian. Apabila kasus yang ditangani melibatkan penyintas dan pelaku dari Fakultas yang berbeda, maka Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN bersama TSU akan mengadvokasikan penyelesaian etik di tingkat Institusi.

Penyelesaian hukum merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, TSU tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau memantau pemberian layanan-layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan bagi penyintas dan/atau saksi (untuk penjelasan rinci tentang hak-hak penyintas dan saksi selama proses penanganan kasus kekerasan seksual, lih. "Apa Saja Hak Penyintas dan Saksi?"). Penetapan sanksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi penyintas melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Mekanisme penyelesaian etik harus dimulai dengan proses investigasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Rektorat dan Komite Etik UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyintas memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ia tempuh.

Tim investigasi yang bersifat *ad hoc* ini harus berisi perwakilan TSU beserta sivitas akademika yang:

- tidak pernah melakukan tindak kekerasan seksual;
- tidak pernah melanggar Kode Etik;
- tidak memiliki konflik kepentingan dalam kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani—misalnya, memiliki hubungan keluarga dengan (terduga) pelaku atau penyintas;
- berperspektif adil gender serta memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan seksual;
- memiliki kapasitas jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dengan baik;
- berkomitmen untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses investigasi berlangsung (lih. “Apa Saja Hak Penyintas dan Saksi?”); serta
- berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Panduan ini (lih. “Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?”).

Guna menjamin terpenuhinya asas keterwakilan dan keadilan, penentuan komposisi keanggotaan tim investigasi juga harus memastikan adanya perwakilan dosen dari Departemen asal (terduga) pelaku dan/atau penyintas. Dalam kasus-kasus khusus, tim investigasi juga dapat melibatkan perwakilan mahasiswa guna menjamin keterwakilan perspektif mahasiswa dalam kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa dan/atau perwakilan profesional yang memiliki keahlian yang diperlukan selama proses investigasi dan tidak sedang mendampingi penyintas terkait, seperti psikolog, psikiater, konselor, advokat, aktivis LSM perempuan, dsb.

Jangka waktu investigasi kasus kekerasan seksual yang diatur oleh Panduan ini adalah 2 (dua) bulan atau 60 hari. Meskipun demikian, tim investigasi dapat memohon perpanjangan waktu kepada Rektorat dan Komite Etik UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN hingga selama-lamanya 1 (satu) bulan atau 30 hari apabila tim mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti[25] yang mungkin diperlukan, seperti:

- keterangan penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku;
- hasil pemeriksaan psikologis terhadap penyintas dan/atau (terduga) pelaku;
- rekam medis, hasil visum et repertum dan/atau psikiatrikum terhadap penyintas;
- dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik;
- dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

[24] Disarikan dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 43.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, tim investigasi berhak:

- Mengundang pihak-pihak yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
- Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil assessment awal yang ditulis oleh konselor TSU;
- Mendapatkan akses ke hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
- Mendapatkan akses ke dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
- Mendapatkan dukungan finansial dan administrasi dalam melakukan kinerjanya, seperti ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus-kasus khusus seperti kekerasan seksual saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktik Belajar Lapangan(PBL); dan
- Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Selain itu, tim investigasi berkewajiban:

- Menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Panduan ini;
- Menghormati dan memenuhi hak-hak penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku;
- Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus kekerasan yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta-fakta yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta rekomendasi alternatif-alternatif penyelesaian etiknya;
- Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian dengan penyintas secara transparan; serta
- Melaporkan hasil investigasi kepada TSU, Komite Etik, dan Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN secara transparan.

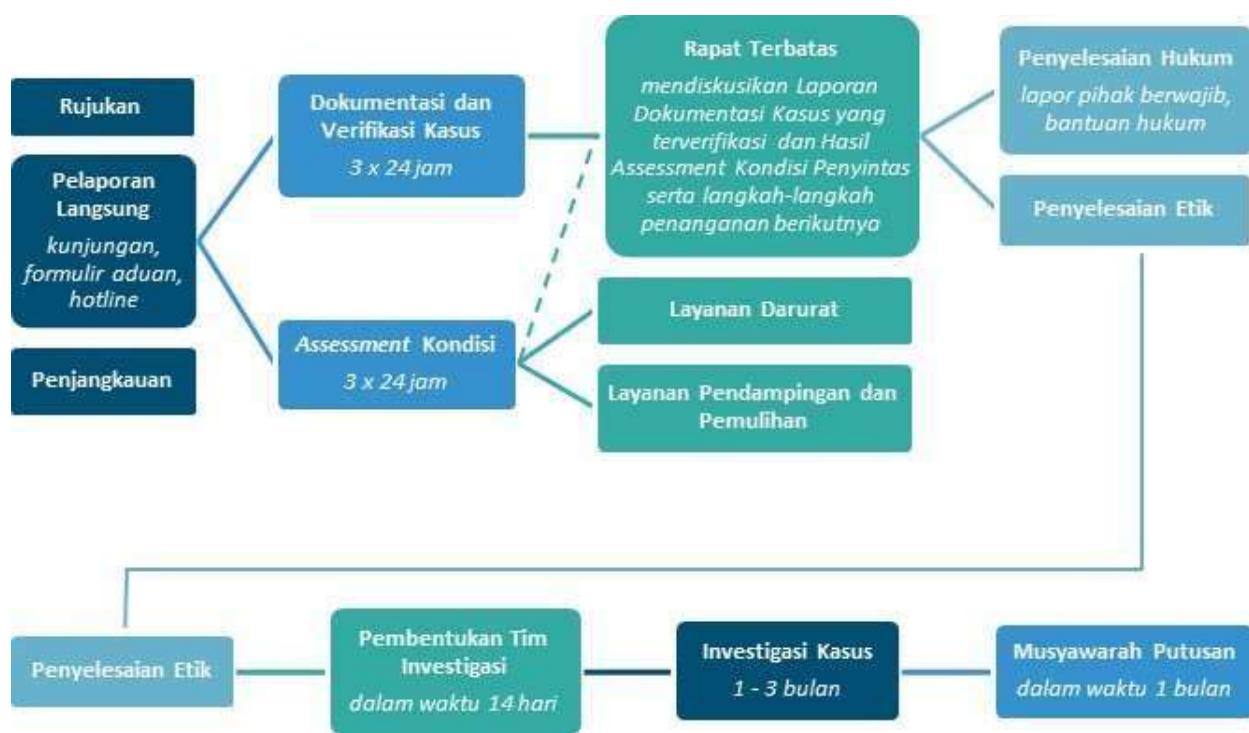
Musyawarah Putusan dan Sanksi Etik

Setelah tim investigasi menyelesaikan penyelidikannya, tim investigasi akan melaporkan hasilnya dalam sebuah musyawarah putusan yang dipimpin oleh Komite Etik dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, (terduga) pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan TSU, dan Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN. Musyawarah putusan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis, kepada penyintas dan pelaku.

Penyintas maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan musyawarah etik tidak adil, di mana penyintas maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya rekonsiderasi terhadap hasil putusan. Jika putusan final tetap dirasa tidak adil, penyintas yang berasal dari UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN berhak meminta dukungan Fakultas untuk menyelesaikan kasus melalui jalur penyelesaian

lain yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian maupun jalur hukum.

Sebagai rangkuman, berikut bagan alur pelaporan dan penindakan kekerasan seksual:



Berikut beberapa sanksi etik yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual:

- Kewajiban mengikuti program rehabilitasi khusus atau pembinaan khusus, seperti *mandatory counseling* yang diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan psikologis dengan evaluasi dan pengawasan berkala oleh TSU;
- Kewajiban melakukan kerja sosial yang memungkinkan perubahan sikap dan perilaku, yang dilakukan di bawah pengawasan dan evaluasi berkala oleh TSU; serta

Sanksi-sanksi lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian[26], seperti:

- Kewajiban memberikan surat pernyataan permohonan maaf atau penyesalan secara terbatas atau publik;
- Surat peringatan;
- Skorsing dari kegiatan akademik, seperti belajar-mengajar, pembimbingan, penelitian, dsb. termasuk melarang pelaku beraktivitas di kampus selama jangka waktu tertentu;
- Penundaan atau pembatalan pemberian hak pelaku, seperti penundaan atau pembatalan kelulusan, pembatalan nilai, penundaan atau pembatalan kenaikan pangkat, dsb.
- Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
- Pemberhentian dengan hormat; dan/atau
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

[26] Disarikan dari beberapa peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Berikut beberapa bentuk restitusi^[27] yang mungkin diberikan kepada penyintas kekerasan seksual:

Permintaan maaf kepada penyintas dan/atau keluarga penyintas;
Ganti rugi material, seperti biaya hidup, biaya pengobatan, biaya konseling, biaya kuliah, maupun ganti rugi material atas dampak permanen, serta ganti rugi lain yang bersifat immaterial;
Layanan pemulihan yang dibutuhkan penyintas, baik layanan medis maupun psikologis;
Pendampingan akademik (jika diperlukan); dan/atau Pemulihan nama baik penyintas dan/atau keluarga penyintas.

Apa Saja Hak Penyintas, Saksi, dan/atau (Terduga) Pelaku?

Perlindungan dan pemberian hak penyintas, saksi, dan pelaku berlaku sejak proses penanganan kasus kekerasan seksual dimulai hingga dinyatakan berakhir oleh TSU. Hak-hak penyintas, saksi, maupun pelaku perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya mengingat, sebagai individu, mereka tetap memiliki hak asasi manusia (HAM).

Hak-Hak Penyintas Kekerasan Seksual

Berikut beberapa hak penyintas kekerasan seksual^[28] yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

1. Hak atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan untuk mendukung penyintas selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan terpadu yang berpusat pada kebutuhan penyintas. Hak atas penanganan antara lain:

hak atas penanganan yang segera, bebas biaya, serta sesuai dengan kebutuhan penyintas;
hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan penyintas tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak penyintas selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum;

[27] Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 46.

[28] Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 22 Ayat 1, Pasal 23, Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, serta Pasal 30 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.

- hak atas pendampingan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat;
- hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus penyintas, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

2. Hak atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penyintas selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaranya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.

3. Hak atas Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

- hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaranya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi penyintas;
- hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diterima serta memperoleh pendampingan dalam mengakses bentuk-bentuk restitusi tersebut, termasuk hak atas pemulihan nama baik;
- hak atas layanan kesehatan bebas biaya untuk pemulihan fisik;
- hak atas layanan psikologis bebas biaya, termasuk bimbingan rohani atau psikiater, untuk pemulihan psikis;
- hak atas layanan pendampingan hukum bebas biaya;
- hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan;
- hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi penyintas dan pendamping.

- hak atas pendampingan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat;
- hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus penyintas, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

2. Hak atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penyintas selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaranya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.

3. Hak atas Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

- hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaranya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi penyintas;
- hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diterima serta memperoleh pendampingan dalam mengakses bentuk-bentuk restitusi tersebut, termasuk hak atas pemulihan nama baik;
- hak atas layanan kesehatan bebas biaya untuk pemulihan fisik;
- hak atas layanan psikologis bebas biaya, termasuk bimbingan rohani atau psikiater, untuk pemulihan psikis;
- hak atas layanan pendampingan hukum bebas biaya;
- hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan;
- hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi penyintas dan pendamping.

Berikut beberapa hak saksi^[29] kasus kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

- hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.
- hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

Berikut beberapa hak (terduga) pelaku^[30] kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

- hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, juru bahasa isyarat, dsb.
- hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
- jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama proses investigasi dan penindakan.

[29] Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 35 Ayat 2 dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.

[30] Dikutip dan disesuaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme Layanan Darurat dan Sistem Perujukan Kekerasan Seksual

Layanan darurat merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada penyintas guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri penyintas. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup penyintas. Karenanya Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU) perlu memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan penyintas, baik secara fisik maupun psikis, mencegahdampak yang lebih merugikan penyintas, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar penyintas.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis penyintas biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh penyintas, yaitu:

- *Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan*, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan datang secara tiba-tiba. Dalam kasus kekerasan seksual, episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.
- *Krisis developmental*, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh penyintas setelah kekerasan terjadi. Seorang penyintas yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode-episode krisis seiring upayanya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa penyintas kekerasan seksual, misalnya, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
- *Krisis eksistensial*, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri penyintas. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode-episode ketika penyintas menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.

Dampak dari episode-episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya, dalam ketidakmampuan penyintas untuk bercerita, ketidakmampuan penyintas untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan penyintas untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami penyintas, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh penyintas.

Siapa yang Berhak Memberikan Layanan Darurat?

Layanan darurat seharusnya diberikan oleh *first responder* atau pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan darurat secara profesional, seperti dokter, perawat, paramedik, atau petugas kesehatan lainnya untuk layanan medis; konselor, psikolog, atau psikiater untuk layanan psiko-sosial; petugas keamanan untuk layanan-layanan yang terkait dengan perlindungan penyintas, lembaga pengada layanan seperti crisis center, organisasi masyarakat sipil ataulembaga pemerintah yang terbiasa menangani kasus kekerasan seksual, dsb. Karenanya, TSU juga perlu berjejaring dengan lembaga pengada layanan di luar UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN guna memastikan akses penyintas terhadap layanan darurat yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh penyintas maupun saksi yang berada di sekeliling penyintas saat kekerasan terjadi bukanlah *first responder* profesional. Dalam kondisi seperti ini, TSU perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi TSU guna meminta bantuan konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

- Mengamati kondisi penyintas sembari menenangkan dan mendengarkannya - bagaimana kondisi fisik dan psikis penyintas, apakah penyintas memiliki kebutuhan khusus? Jika penyintas menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawanya ke rumah sakit;
- Mengamati situasi penyintas - apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya? Jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
- Mencatat kebutuhan penyintas dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan penyintas, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian penyintas atau alat yang dipakai untukmelakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus perkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan penyintas untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
- Mengupayakan melapor pada TSU sesegera mungkin.

Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan

Mekanisme pendampingan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak penyintas memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke TSU hingga penyintas merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya seorang penyintas kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan observasi profesional yang dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan penyintas.

Sebagai sebuah lembaga layanan, Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU) berkomitmen untuk membantu penyintas kekerasan seksual mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh TSU harus memenuhi prinsip-prinsip Panduan ini. Meskipun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir dan/atau diberikan oleh TSU juga dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku yang sekiranya memerlukan—misalnya, ketika pelaku diharuskan menjalani program rehabilitasi khusus seperti *mandatory counseling* sebagai sanksi atas perilakunya.

Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan?

Dalam Panduan ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang ia alami. Misalnya, konselor, pendamping psikososial, dan psikolog untuk pendampingan psikologis; dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis; konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum; atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Beberapa pendamping di atas bekerja di bawah Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU). Akan tetapi, guna menjamin akses penyintas terhadap layanan pendampingan dan pemulihan yang lebih komprehensif, TSU dimungkinkan untuk meminta bantuan pendamping dari lembaga-lembaga pengada layanan yang berada di luar UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan *support system* di sekeliling penyintas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada penyintas kekerasan seksual, yang terpanggil untuk turut mendampingi dan membantu penyintas sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. Support system yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (peers), rekan kerja, dosen, dosen pembimbing, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis

Layanan pendampingan dan pemulihan medis diberikan pada penyintas yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, layanan medis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan/atau *visum et repertum* untuk keperluan penanganan kasus.

Di Yogyakarta, penyintas kekerasan dibebaskan dari biaya untuk pemeriksaan kesehatan melalui dua mekanisme: asuransi BPJS atau Surat Keabsahan Peserta (SKP) yang dapat dimintakan penyintas yang tak memiliki BPJS pada Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan/atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPP) DI Yogyakarta. SKP dapat dipakai untuk melakukan pemeriksaan gratis dalam jangka waktu 1 x 24 jam, atau 3 x 24 jam untuk RS Sardjito.

Karena TSU tidak memiliki fasilitas medis, maka penyintas yang membutuhkan layanan tersebut akan dirujuk ke lembaga pengada layanan mitra baik yang berada di dalam atau di luar lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis

Layanan pendampingan dan pemulihan psikologis diberikan pada penyintas yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater, baik ketika penyintas melaporkan kasusnya untuk pertama kali maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Selain itu, layanan psikologis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan psikologis dan/atau *visum et psikiatrikum* untuk keperluan penanganan kasus. Target dari upaya pendampingan dan pemulihan psikologis adalah membuat penyintas berdaya dalam mengelola dirinya sendiri. Namun, aktivitas-aktivitas pendampingan psikologis biasanya dilakukan di waktu yang berbeda dengan intervensi psikologis untuk pemulihan.

Pendampingan psikologis yang diberikan pada penyintas saat yang bersangkutan melaporkan kasusnya kepada TSU untuk pertama kali merupakan sesi konseling yang mengikuti alur berikut:



Pendampingan psikologis juga mencakup upaya-upaya untuk memberi tahu penyintas dan/atau saksi mengenai alternatif-alternatif penyelesaian apa yang dapat diambil beserta konsekuensi apa yang mungkin akan timbul, termasuk konsekuensi psikologisnya. Jika penyintas memilih penyelesaian hukum, maka pendamping juga harus mempersiapkan kondisi psikologis penyintas dalam menghadapi proses hukum.

Sementara itu, dalam konteks pemulihan, pendampingan psikologis biasanya perlu diberikan guna menguatkan *support system* penyintas, seperti keluarga, teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dsb. Mengapa demikian? Karena proses pemulihan penyintas kekerasan seksual biasanya bergantung pada keberadaan support system yang mampu menemani, mendengarkan, dan memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung penyintas:

- Pastikan bahwa penyintas aman - *support system* harus memastikan penyintas berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya.
- Jelaskan tentang batas kerahasiaan - menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan penyintas, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi penyintas kepada orang lain. Misalnya, ketika penyintas dalam kondisi terancam keselamatannya maka pendamping atau *support system* diwajibkan untuk bercerita dan mencari bantuan. Batas kerahasiaan dapat dikatakan, misalnya, dengan cara berikut:

“Semua yang kamu katakan bersifat rahasia kecuali jika aku merasa bahwa keamananmu atau keamanan orang lain terancam. Jika itu terjadi, aku mungkin perlu untuk bicara dengan orang lain di kampus untuk memastikan aku bisa membantumu semaksimal mungkin dan memenuhi tanggungjawabku.”

- Tanyakan tentang keinginan penyintas - pendamping atau *support system* harus menanyai dan memastikan persetujuan penyintas sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut.

- Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan - ketika mendengar penyintas bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya, maka:
 - a) dengarkan ceritanya dengan serius;
 - b) hargai pengalaman penyintas;
 - c) pahami bahwa penyintas kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - d) bebaskan penyintas untuk menentukan ritme interaksi—kapan berbicara, kapan diam, biarkan penyintas berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - e) sadari bahwa proses bercerita bisa jadi menimbulkan trauma sehingga membatasi kemampuan penyintas dalam mengingat kekerasan yang dialaminya, namun hal ini tidak menghilangkan validitas pernyataan penyintas;
 - f) dengarkan penyintas dengan aktif dan perhatikan bias diri sendiri dalam respon yang diberikan;
 - g) dengarkan klaim dan tuntutan penyintas, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah penyintas untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan penyintas;
 - h) dengarkan apapun cerita yang diberikan penyintas, jangan paksa penyintas bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 - i) hindari membicarakan topik di luar cerita penyintas kecuali atas permintaan penyintas sendiri;
 - j) hindari respon-respon yang mendramatisasi kejadian karena berpotensi membuat penyintas merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
 - k) hindari berkomentar buruk tentang pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat penyintas terlalu fokus pada pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan;
 - l) biarkan penyintas memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan yang dialami.
- Petakan bantuan - pastikan pada penyintas bantuan selalu tersedia serta bantu penyintas memetakan serta menentukan bantuan-bantuan yang akan diakses.
- Lanjutkan dan jaga diri - setelah penyintas bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi—jangan ubah sikap terhadap penyintas dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu penyintas kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun *support system* lainnya.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Hukum

Pendampingan hukum diberikan bagi penyintas yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini bertujuan menyiapkan penyintas untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani penyintas atau dengan memberikan bantuan hukum.

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh "paralegal" atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Alur proses hukum adalah sebagai berikut:



Sementara proses di Kepolisian meliputi:



Selama proses di atas, berikut pendampingan hukum[31] yang perlu diberikan:

- Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
- Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi *briefing* mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- Melakukan *assessment* terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika potensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu penyintas dan/atau *support system*-nya tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui sekaligus konsekuensinya;

Dikutip dari buku Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY yang disusun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC.

- Melakukan pendekatan kepada penyidik, jaksa, dan hakim guna mengadvokasi kasus yang ditangani;
- Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat digunakan sebagai bukti pendukung karena catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami penyintas beserta kerentanannya;
- Jika perkara akhirnya diselesaikan ke proses di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan penyintas;
- Memberi bantuan hukum.

Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik

TSU harus mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi penyintas yang masih menjadi mahasiswa aktif di UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, TSU perlu bekerjasama dengan Pengurus Departemen atau Program Studi yang terkait, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), atau dosen pembimbing penyintas.

Berikut alur pendampingan akademik oleh TSU:



Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik yang bisa dilakukan:

- melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami penyintas;
- menyediakan pendamping akademik yang berusia sebaya;
- mendukung dan menyediakan mekanisme agar penyintas dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
- memberi keringanan atau menanggung semua biaya kuliah yang diperlukan penyintas karena yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu;
- bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena penyintas masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami;
- bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah penyintas dengan dosen pembimbing;
- pemakluman bagi penyintas yang mendapatkan beasiswa berbasis IPK, jika IPKnya menurun karena kasus kekerasan yang dialami;
- jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke Perguruan Tinggi lain.

Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Mekanisme pencegahan^[32] terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN melalui transformasi di bidang:

- Pengajaran dan kemahasiswaan;
- Penelitian, pengabdian, dan kerjasama;
- Infrastruktur dan tata ruang kampus; serta
- Tata kelola kelembagaan, termasuk perekutan sumber daya manusia.

Di bidang pengajaran dan kemahasiswaan, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- Memasukkan sesi mengenai penghapusan kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- Memasukkan komitmen untuk tidak melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun dalam kontrak dengan mahasiswa baru;
- Mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat Diploma, sarjana maupun pascasarjana;
- Mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktik Belajar Lapangan (PBL), mengikuti program magang, atau program pertukaran;
- Mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa magang atau pertukaran yang berada di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN;
- Mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada para dosen dan tenaga kependidikan;
- Membuat *code of conduct* yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual;
- Memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan pengajaran, kemahasiswaan, serta tata kelola unit-unit pengajaran dan kemahasiswaan.;
- dll.

[31] Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1, dan Pasal 10 Ayat 1.

Di bidang penelitian, pengabdian, dan kerjasama, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- Mendorong pengembangan kajian mengenai problem-problem gender, termasuk kekerasan seksual;
- Memastikan mitra program penelitian, pengabdian, dan kerjasama mengetahui komitmen UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN terhadap penghapusan kekerasan seksual;
- Memasukkan komitmen terhadap penghapusan kekerasan seksual dalam pembuatan kontrak penelitian, pengabdian, maupun kerjasama;
- Memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan penelitian, pengabdian, kerjasama, dan tatakelolanya;
- dll.

Di bidang infrastruktur dan tata ruang kampus, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- Membangun lingkungan dan fasilitas publik di UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN yang aman dan nyaman;
- Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, **CCTV**, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan kekerasan, termasuk kekerasan seksual;
- **Merancang *code of conduct*** yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, misalnya, aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor, dsb.;
- Mengembangkan berbagai medium yang dapat dipakai untuk mengampanyekan ide-ide tentang kampus bebas kekerasan seksual;
- dll.

Di bidang tata kelola kelembagaan, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU), seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb.;
- Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- Mendorong dan memastikan Departemen-Departemen menunjuk *focal person* yang dapat bekerjasama dengan TSU dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
- Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN;
- Mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada seluruh warga di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, peneliti dan asisten peneliti di pusat kajian, dsb.;
- Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level Fakultas;
- Memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus; * dll.

Pendanaan dan Kerjasama

Guna mendukung tercapaianya penghapusan kekerasan seksual di kampus, UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN melalui TSU diperkenankan melakukan inisiasi kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang berniat mendukung inisiatif UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN menjadi kampus damai yang bebas dari kekerasan seksual.

Seluruh pembiayaan yang muncul karena upaya-upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN ditanggung pertama-tama oleh Rektorat UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN. Kemungkinan pendanaan dari pihak lain, termasuk Departemen penyintas dan/atau (terduga) pelaku, akan dibicarakan kemudian.

Sama seperti unit lain di UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN, Tim Satgas UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN (TSU) berkewajiban merancang anggaran belanja, menggunakannya, dan melaporkannya melalui mekanisme yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.

Referensi

- Abshor, M. K. (2018). Faktor Risiko Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Kasus pada Anak Laki-laki Korban Pelecehan Seksual) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naskah Dipublikasikan Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018).
- Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian. Jurnal Kesehatan Perintis. Audina, Y., & Tianingrum, N. A. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan Seksualitas Dengan Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda.
- Borneo Student Research. Azzahra, A. C., Ervina, I., & Rahmawati, E. I. (2020). Booklet Sebagai Media Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Orang Tua.
- Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, 402 - 410. Dewi, N. A. (2012). Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Perkembangan Seksualitas Pada Remaja Awal SMPIT Anugerah Insani Bogor. Keperawatan Universitas Indonesia. Naskah Dipublikasikan Dhati, N. A. (2013). Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Seks Pranikah Di SMAN 1 Pundong Bantul Yogyakarta. Naskah Dipublikasikan Dwiyono, Y. (2021). Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: Deepublish
- Erni. (2013). Pendidikan Seks Pada Remaja. Jurnal kes. Evelyn, T., Mawarni, A., & Dharminto. (2016). Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Keterpaparan Program Yayasan Setara Dengan Media Video (Studi Kasus Di 2 SD Di Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat (eJournal), 257 - 262.
- Gainau, M. B. (2015). Perkembangan Remaja dan Problematikannya. Yogyakarta: PT Kanisius. Hartono, J. (2018). Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: ANDI. 75 Kinanti, I. (2020, April 23). Cara Sederhana Untuk Menghindari Pelecehan Seksual. Dipetik Maret 13, 2022, dari <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3616246/carasederhana-untuk-menghindari-pelecehan-seksual>
- Kusuma, I., D. Navi, Y. K., Veronica, & et.al. (2020). Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Mukhlis. (2021, desember 28).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sxual Abuse: Impact And Hendling. Sosio Informa. Noviani P, U. Z., Arifah K, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Jurnal Penelitian & PPM, 1 - 100.
- Nurbaya, N., J, N. N., & Asrina, A. (2019). Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. Jurnal Yapri. Nurfauziah, R. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Perilaku Seksual Berisiko Di SMK Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019. Naskah Dipublikasikan Nurmala, I., Muthmainnah, Rachmayanti, R. D., & et.al. (2020). Mewujudkan Remaja Sehat Fisik Mental dan Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nuryadin. (2016). Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja; Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 91-94. Octavia, S. A. (2020). Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja. Yogyakarta: Deepublish.
- Parinding, D. (2018, Februari 20). Hormon Pertumbuhan Remaja. Dipetik Januari 5, 2022, dari www.alodokter.com: <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/growth-hormone> Putri, N. H., & Utari, R. (2020, Mei 09). Jenis Dan Dampak Kekerasan Seksual. Dipetik Maret 13, 2022, dari <https://www.google.com/amp/s/www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan/amp>

Rachmalia, N. (2019). Pengaruh Booklet Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Anak Usia Dini Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah Dipublikasikan. Ratnasari, R. F., & Alias, M. (2016). Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Tarbawi Khatulistiwa.

Rini. (2020). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial). IKRA-ITH Humaniora. S, M. I. (2022, Februari). dari Klik Dokter: <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022

Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Simarmata, N. I., Hasibuan, A., Rofiki, I., Purba, S., Tasnim, Sitorus, E., et al. (2021). Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sinaga, L. V., Sianturi, E., Maisyarah, Amir, N., Simamora, J. P., Ashriady, et al. (2021). Pendidikan Ilmu Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Yayasan Kita Menulis. Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Srimiyati. (2020). Pendidikan Kesehatan Menggunakan Booklet Berpengaruh Terhadap Pengetahuan dan Kecemasan Wanita Menghadapi Menopause. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.

Sudarsana, I. (2017). Teori Perkembangan Sosial. Naskah Dipublikasikan 77 Swarjana, I. K. (2022). Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan,Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid 19, Akses Layanan Kesehatan - Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Trisutrisno, I., Hasnidar, Lusiana, S. A., Simanjuntak, R. R., Hadi, S., Sianturi, E., et al. (2022). Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Yayasan Kita Menulis. Wulandari, A. (2014). Karakteristik Pertumbuhan Perkembangan Remaja dan Implikasinya Terhadap Masalah Kesehatan dan Keperawatannya. Jurnal unimus.

Lampiran: Glosarium

NO.	ISTILAH	DEFINISI
1	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2	<i>Assessment</i>	Penilaian yang dilakukan oleh pendamping dan/ atau penyedia layanan terhadap dampak kekerasan seksual terhadap kondisi fisik dan psikis penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan.
3	Bukti	Hal-hal yang dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran adanya tindak kekerasan seksual, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan penyintas, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian penyintas atau alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, dsb.
4	Dampak	Trauma fisik maupun psikis serta akibat lainnya yang dirasakan oleh penyintas setelah mengalami kekerasan seksual.
5	Dokumentasi	Mekanisme awal yang dilakukan saat laporan kekerasan seksual diterima, berupa pencatatan dan pengarsipan identitas pelapor; identitas (terduga) penyintas; identitas (terduga) pelaku; jenis kekerasan seksual yang terjadi; kronologi kejadian; serta informasi mengenai saksi, bukti, maupun informasi lain yang relevan.
6	Eksloitasi seksual	Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.
7	Ekspresi gender	Cara seseorang mengekspresikan identitas gendernya yang ditunjukkan melalui perilaku, sikap, cara berpakaian, maupun bentuk ekspresi lainnya.
8	<i>First responder</i>	Orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan darurat secara profesional, seperti dokter, perawat, paramedis, atau petugas layanan kesehatan lainnya untuk layanan medis; konselor, psikolog, atau psikiater untuk layanan psikososial; petugas keamanan untuk layanan perlindungan; lembaga pengda

		layanan seperti <i>crisis center</i> , organisasi masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah yang terbiasa menangani kasus kekerasan seksual.
9	Hak banding	Hak bagi penyintas maupun pelaku untuk menyatakan pembelaannya dan memohon adanya rekon siderasi terhadap hasil putusan jika putusan masyarakat etik dirasa tidak adil. Baik penyintas maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali.
10	Hak penyintas	Hak-hak bagi penyintas yang perlu dijamin dan dilindungi pemenuhannya, mencakup hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.
11	Hak saksi	Hak-hak bagi saksi selama proses penanganan kasus kekerasan seksual yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya.
12	Hak (terduga) pelaku	Hak-hak bagi (terduga) pelaku selama proses penanganan kasus kekerasan seksual yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya.
13	Identitas gender	Persepsi seseorang mengenai identitas gendernya yang tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis.
14	Intimidasi seksual	Tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan non-fisik pada korban. Termasuk di dalamnya adalah ancaman dan percobaan perkosaan, serta intimidasi yang dilakukan secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> .
15	Investigasi	Mekanisme yang dilakukan guna mencari data-data yang diperlukan dalam menentukan sanksi etik bagi pelaku dan restitusi bagi penyintas kekerasan seksual.
16	Kampus damai	Kampus yang bebas dari kekerasan langsung dalam bentuk apapun, serta kekerasan struktural dan kultural yang memungkinkannya terjadi.
17	Kekerasan dalam pacaran	Tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga, yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan korban.
18	Kekerasan dalam rumah tangga	Tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan, perampasan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban.

19	Kekerasan kultural	Kekerasan yang bekerja di level simbolik, yang membenarkan dan menormalisasi keberadaan kekerasan langsung dan struktural.
20	Kekerasan langsung	Kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, di mana siapa yang melakukan (subyek) dan yang dikenai kekerasan (obyek) tampak secara kasat mata.
21	Kekerasan seksual	Semua tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak orang tersebut atau ketidakmampuan orang tersebut memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
22	Kekerasan struktural	Kekerasan yang bekerja di level sistem, terlembaga, dan berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan.
23	Kondisi darurat	Kondisi di mana penyintas mengalami trauma fisik maupun psikologis yang sangat berat sehingga yang bersangkutan tidak mampu beraktivitas secara mandiri tanpa mengancam keselamatan dirinya.
24	Kondisi tidak darurat	Kondisi yang tidak memenuhi kriteria darurat sehingga proses penanganan kasus dan pemulihan dapat dimulai sesuai dengan kebutuhan penyintas.
25	Konferensi kasus	Pertemuan antara TSU dan lembaga-lembaga pengada layanan yang terkait dengan kasus yang ditangani yang diadakan guna membicarakan perkembangan proses penanganan kasus.
26	Konselor	Seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
27	Krisis	Kondisi genting yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya, yang mencakup setidaknya tiga episode: krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis developmental, dan krisis eksistensial.
28	Layanan darurat	Layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada penyintas guna merespon kondisi darurat.

29	Musyawarah putusan	Musyawarah yang dipimpin oleh Komite Etik dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan TSU, dan Rektorat guna mendengarkan laporan hasil investigasi dan menentukan sanksi etik yang akan diberikan pada pelaku serta restitusi yang akan diberikan pada penyintas.
30	Orientasi seksual	Ketertarikan romantis dan/atau seksual seseorang terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual).
31	<i>Peer</i>	Teman sebaya penyintas.
32	Pelecehan seksual	Tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.
33	Pemaksaan aborsi	Upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan menggunakan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
34	Pemaksaan kehamilan	Upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
35	Pemaksaan kontrasepsi	Upaya-upaya untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan atau sistem reproduksinya.
36	Pemulihan	Seluruh upaya pendampingan yang diberikan guna mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, serta dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.
37	Penanggulangan	Segala upaya yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, yang meliputi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan kasus kekerasan seksual; mekanisme tanggap darurat dan sistem perujukan; serta mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual (maupun pelaku dalam kondisi tertentu).

38	Pencegahan	Segala upaya nirkekerasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya dan berulangnya kekerasan seksual di lingkungan UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.
39	Pendamping	Orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang ia alami.
40	Pendampingan	Aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani tahapan-tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya.
41	Pendampingan akademik	Layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang membutuhkan bantuan agar mampu menyelesaikan masa studinya dengan memuaskan.
42	Pendampingan hukum	Layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini diberikan guna menyiapkan penyintas dalam mencari keadilan melalui jalur hukum.
43	Pendampingan medis	Layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun dengan rawat jalan. Pemeriksaan fisik menyeluruh dan <i>visum et repertum</i> juga termasuk di dalam layanan ini.
44	Pendampingan psikologis	Layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Pemeriksaan psikologis dan <i>visum et psikiatrikum</i> juga termasuk di dalam layanan ini.
45	Penjangkauan	Segala upaya yang dilakukan untuk menjangkau penyintas kekerasan seksual berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman (<i>peer</i>) penyintas.
46	Penyelesaian etik	Penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan I T E B A . . Proses ini hanya berlaku di mana (terduga)

		<p>pelaku merupakan bagian dari sivitas akademika sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Pasir Pengaraian.</p>
47	Penyelesaian hukum	<p>Penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
48	Penyiksaan seksual	<p>Tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang telah atau diduga dilakukan oleh korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.</p>
49	Penyintas	<p>Seseorang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami tindak kekerasan seksual.</p>
50	Perkosaan	<p>Pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Termasuk di dalamnya adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, dan atau lainnya</p>
51	Perlindungan	<p>Seluruh upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman kepada penyintas dan/atau saksi kasus kekerasan seksual.</p>
52	Persetujuan (<i>consent</i>)	<p>Syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan seksual, untuk melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan dan tekanan.</p>
53	Relasi kuasa	<p>Kepemilikan kuasa antara orang perorang yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya, terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior.</p>

54	Restitusi	Ganti rugi bagi penyintas kekerasan seksual yang diberikan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian etik maupun hukum.
55	Rumah tangga	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) suami, istri, maupun mantan suami atau mantan istri; b) anak—baik kandung, tiri, maupun angkat; c) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap di dalam rumah tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; d) orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut, seperti asisten rumah tangga.
56	Saksi	Orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung.
57	Sanksi etik	Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian etik.
58	<i>Support system</i>	Orang-orang yang berada di sekeliling penyintas memiliki empati kepada penyintas dan merasa terpanggil untuk turut mendampingi serta membantu penyintas sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih, seperti teman sebaya, rekan kerja, dosen, dosen pembimbing, tenaga kependidikan, anggota keluarga, dsb.
59	Surat rujukan	Surat yang dikeluarkan TSU sebagai lembaga perujuk kepada lembaga pengada layanan eksternal yang melampirkan laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi serta hasil assessment awal sehingga penyintas tidak perlu bercerita berulangkali mengenai pengalaman kekerasan yang menimpanya
60	Verifikasi	Mekanisme awal yang dilakukan guna memeriksa kebenaran laporan kekerasan seksual yang diterima. Laporan yang terverifikasi akan didiskusikan bersama Rektorat dengan melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya.
61	<i>Visum et repertum</i>	Visum yang dilakukan guna mengetahui dampak kekerasan terhadap kondisi fisiologis penyintas
62	<i>Visum et psikiatrikum</i>	Visum yang dilakukan guna mengetahui dampak kekerasan terhadap kondisi psikis penyintas.